



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

Jalan Surapati Nomor 1 Telepon (0365) 41210 Negara

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
NOMOR : 04/BPMPD/ 2015**

**TENTANG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jemberana;
 - c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jemberana Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jemberana

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2014;

KEDUA :

- KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penerapan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana;
- KETIGA : Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di negara
Pada tanggal 18 Pebruari 2015
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana,

Drs. I Nengah Ledang
Pembina Tk. I
NIP. 19620302 198303 1 025

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan;
3. Wakil Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2014.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini telah mengacu pada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selama Tahun 2014 yang disesuaikan dengan RKT yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana, maka hasil penyusunan LAKIP ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2014.

Negara, 18 Pebruari 2015

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana,

Drs. I Nengah Ledang
Pembina Tk. I
NIP. 19620302 198303 1 025

DAFTAR ISI

	halaman
SK PENETAPAN LAKIP 2012.....	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN/DIAGRAM	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana	5
BAB II PERENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA.....	31
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	31
A.1 Visi	31
A.2 Misi.....	32
A.3 Tujuan dan Sasaran.....	32
B. PERJANJIAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Pengukuran Kinerja	42
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	45
B.1 Capaian Kinerja Tahun 2005 - 2011	55
B.2 Capaian Kinerja Tahun 2012	56
BAB IV P E N U T U P	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran-Saran	74
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL LAKIP

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan PMD.....	33
Tabel 2.2 Penjabaran Sasaran Badan PMD pada Masing – masing Kegiatan.....	35
Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 3.1 Jumlah BUMDes di Kabupaten Jembrana.....	45
Tabel 3.2 Tingkat Perkembangan LPD di Kabupate Jembrana.....	46
Tabel 3.3 Tingkat Perkembangan Aset LPD di Kabupaten Jembrana.....	46
Tabel 3.4 Perkembangan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah	47
Tabel 3.5 Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana	47
Tabel 3.6 Perkembangan Pokmas di Kabupaten Jembrana 2005 - 2010.....	48
Tabel 3.7 Hasil Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat tahun 2007 s/d 2011 ..	49
Tabel 3.8 Perkembangan Jumlah LPM tahun 2005 s/d 2011	49
Tabel 3.9 Klasifikasi Posyandu di Kabupaten Jembrana	50
Tabel 3.10 Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan	53
Tabel 3.11 Perkembangan Alokasi ADD dan Hasil Bagi Pajak.....	53
Tabel 3.12 Tingkat Perkembangan BUMDes.....	59
Tabel 3.13 Klasifikasi Keragaan Posyandu.....	60
Tabel 3.14 Hasil Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat tahun 2011 s/d 2012..	61
Tabel 3.15 Perkembangan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah.....	62
Tabel 3.16 Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan.....	68
Tabel 3.17 Perkembangan Alokasi ADD dan Hasil Bagi Pajak.....	69
Tabel 3.18 Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan PMPD Kabupaten Jemrana Tahun 2011.....	70
Tabel 3.19 Realisasi Belanja Langsung Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2011.....	59

DAFTAR DIAGRAM LAKIP

	Halaman
Diagram 1.1 Struktur Organisasi Badan PMPD	12
Diagram 1.2 Alur Visi Badan PMPD.....	13

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategik sampai pada pengukuran kinerja kegiatan, kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Rencana Strategik dan Rencana Kerja tahun 2014 serta pengukuran Kinerja dan hasil capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2014.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana tahun 2014, didukung dengan dana sejumlah Rp 5.373.177.200,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp 2.717.598.400,00 sedangkan Alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.655.578.800,00. Dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 2.572.751.089,00 (95 %), silpa belanja tak langsung sebesar Rp. 144.847.311,00 (5%) sedangkan untuk realisasi

belanja langsung sebesar Rp. 2.617.958.220,00 (98,6%). dengan silpa belanja langsung sebesar Rp. 37.620.309,00 (1,4%)

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2014 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya. Penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa akan datang .

Negara, 18 Pebruari 2015.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana,

Drs. I Nengah Ledang
Pembina Tk. I
NIP. 19620302 198303 1 025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang –undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi



pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengacu pada hal tersebut bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Anggaran 2014 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta urusan Ketahanan Pangan sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.



1.2. DASAR HUKUM

LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2014 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



- dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3)
 - m. Peraturan Bupati Jember Nomor 52 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jember



1.3. GAMBARAN UMUM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, telah ditetapkan pula Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana. Adapun Struktur Organisasi dalam PERDA tersebut terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
 - a. Kepala Subag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Kepala Subag Keuangan
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Kepala Subid Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa
 - b. Kepala Subid Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga
4. Kabid Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
 - a. Kasubid Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat
 - b. Kasubid Pengembangan sarana/prasarana dan TTG
5. Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - a. Kasubid Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - b. Kasubid Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
6. Kabid Ketahanan Pangan
 - a. Kasubid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - b. Kasubid Konsumsi dan Keamanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 61 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, struktur



Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana adalah :

1. KEPALA BADAN :

- A. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan ketahanan pangan
- B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakatan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta ketahanan pangan
 - b. mengkoordinasika penyusunan rencana dan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dengan ketahanan pangan
 - c. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum kepegawaian berdasarkan kewenangan
 - e. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta ketahanan pangan
 - f. mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Badan
 - g. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - h. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;



- i. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

2. SEKRETARIAT :

- A. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakatan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 - b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
 - c. mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan koodinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;



- e. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Badan;
- f. melaksanakan urusan keuangan;
- g. menyelenggarakan urusan perawatan inventaris dan peralatan Badan;
- h. menerima naskah surat-surat yang masuk- mencatL mendistribusikan ke KepalaBidang. sub bagian. sub bidang: i. menyimpan data / arsip naskah dinas keluar / masuk;
- j. merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan Badan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan Kabupaten serta Penetapan Kinerja Badan;
- l. mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan Pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarier;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- p. menyusun laporan hasil kegiatan.
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan;

3. BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

- A. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, kesejahteraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan serta melaksanakan sistem pengendalian intern.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan/perumusan program kerja sesuai dengan kebijakan Badan;



- b. pengoordinasian program kerja bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. pengevaluasian dan pengendali pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai program Badan;
 - b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. mengkoordinasikan rencana program atau kegiatan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan Penanggulangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
 - e. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
 - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,;
 - h. melaksanakan sistem pengendalian intern
 - i. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan



4. BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN PERDESAAN

- A. Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, pembinaan, fasilitasi pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan sarana prasarana kawasan perdesaan dan pemanfaatan sumberdaya alam
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan perumusan perencanaan Bidang sesuai program Badan;
 - b. pelaksanaan koordinasi , pembinaan fasilitasi, pengembangan teknologi tepat guna, pemanfaatan sumberdaya alam serta peningkatan sarana prasarana kawasan pedesaan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai program Badan;
 - b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
 - c. merumuskan vahan koordinasi pelaksanaan program kegiatan peningkatan sarana prasarana pedesaan, pemanfaatan sumberdaya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna
 - d. mengkoordinasikan rencana pengembangan sarana prasarana kawasan pedesaan
 - e. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
 - f. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - h. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;



- i. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat, sarana prasarana kawasan pedesaan, pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis pada atasan
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

5. BIDANG KETAHANAN PANGAN

- A. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan membagi tugas, member petunjuk, mengevaluasi, mengendalikan, merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pembinaan fasilitasi bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sesuai program Badan;
 - b. pelaksanaan program kerja ketahanan pangan yang menyangkut pembinaan fasilitasi ketersediaan distribusi konsumsi dan keamanan pangan
 - c. pelaksanaan koordinasi ketahanan pangan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai program Badan;



- b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan ketahanan pangan
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait penanganan ketahanan pangan
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan evaluasi serah terima kegiatan pembangunan;
- g. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. memberi saran pertimbangan teknis pada atasan
 1. melaksanakan sistem pengendalian intern
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

6. BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

- A. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, pembinaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang kebijakan Badan;



- b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang berdasarkan kebijakan Badan;
- b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan
- d. menyelenggarakan evaluasi kegiatan di bidang;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
- g. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. memberi saran pertimbangan teknis pada atasan
 - 1. melaksanakan sistem pengendalian intern
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA



Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai : 33 Orang
2. Kualifikasi Pendidikan :
 - a. SD : - Orang
 - b. SMA : 14 Orang
 - c. D3 : 1 Orang
 - d. S1 : 14 Orang
 - e. S2 : 4 Orang
3. Pangkat dan Golongan :
 - a. Gol. II/a (Pengatur Muda) : 2 Orang
 - b. Gol. II/c (Pengatur) : 3 Orang
 - c. Gol. III/a (Penata Muda) : 2 Orang
 - d. Gol. III/b (Penata Muda Tk. I) : 8 Orang
 - e. Gol. III/c (Penata) : 10 Orang
 - f. Gol. III/d (Penata Tk. I) : 4 Orang
 - g. Gol. IV/a (Pembina) : 3 Orang
 - h. Gol IV/b (Pembina Tk. I) : 1 Orang
4. Jumlah Pejabat Struktural : 17 Orang

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS

A. Aspek Strategis

- a. Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c. Mantapnya pemberdayaan pemerintahan dan kelembagaan masyarakat desa
- d. Mantapnya sistem pembangunan partisipatif masyarakat
- e. Mantapnya sistem ketahanan pangan masyarakat secara dinamis

B. Isu Strategis

- a. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber – sumber kemajuan ekonomi yang meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasi pasar.
- b. Masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi serta aspek lainnya terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.
- c. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penggunaan bahan pangan alternatif dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan

partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

A. VISI

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menetapkan visi. Perumusan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, mengacu pada Tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2008.

Perumusan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana disusun sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JEMBRANA YANG BERBUDAYA GOTONG ROYONG DAN PARTISIPATIF, DIDUKUNG PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”.

Penjelasan Visi :

1. Terwujudnya Masyarakat yang berbudaya gotong royong dan partisipatif artinya seluruh masyarakat memiliki rasa kebersamaan yang kuat baik berkaitan dengan kegiatan perekonomian, sosial dan keagamaan dan berperan secara aktif memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk material.
2. Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa adalah sebagaimana dimaksud pada PP 72 dan PP 73 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.

pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana ditetapkan Misi. Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien. Berdasarkan Visi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan, maka Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keberdayaan Kelembagaan Sosial dan Usaha Ekonomi Masyarakat untuk Menanggulangi Kemiskinan;
2. Meningkatkan Keberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes);
4. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara konsisten;
5. Mewujudkan manajemen dan layanan administrasi perkantoran yang prima.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana yang ditetapkan meliputi :

- Meningkatkan keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat
- Memantapkan sistem pembangunan partisipatif masyarakat
- Mengembangkan Sistem Kepemerintahan Desa dengan prinsip – prinsip good governance
- Meningkatkan sistem ketahanan pangan lokal yang mantap dan dinamis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badan PMD Kabupaten Jembrana

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan manajemen dan layanan administrasi perkantoran yang prima	a. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang profesional dan taat azas b. Terlaksananya pengelolaan barang dan aset dinas yang efektif, efisien c. Terkelolanya administrasi dan data kepegawaian yang baik dan dinamis
2.	- Meningkatkan Keberdayaan Kelembagaan Usaha dan Sosial Ekonomi Masyarakat - Mantapnya Sistem Pembangunan Partisipatif Masyarakat	Terwujudnya peningkatan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yang mantap dan mandiri a. Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan b. Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
3.	Mengembangkan Sistem Kepemerintahan Desa dengan Prinsip – prinsip Good Governance	a. Terwujudnya kelembagaan dan manajemen Pemerintahan Desa yang baik b. Terwujudnya Pengembangan Kelembagaan Masyarakat desa yang dinamis dan mandiri c. Terwujudnya aparatur Pemerintah Desa yang profesional dan pelayanan prima

		dan keuangan desa secara transparan dan akuntabel
		e. Terwujudnya sistem administrasi desa yang modern.
4.	Meningkatkan Sistem Ketahanan Pangan Lokal yang Mantap dan Dinamis	<p>a. Terwujudnya Peningkatan hasil/produksi pangan lokal</p> <p>b. Terwujudnya distribusi hasil pangan secara lancar dan adil</p> <p>c. Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan lokal secara dinamis</p>

Masing-masing sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam sasaran kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penjabaran Sasaran Badan PMPD pada Masing-Masing Kegiatan

NO	SASARAN	SASARAN KEGIATAN
1	Terwujudnya peningkatan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yang mantap dan mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan (LPD, BUMDes, UPK), yang sehat - Meningkatnya administrasi pengelolaan dana bergulir
2.	Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya desiminasi, terapan dan nilai tambah ekonomi produksi terapan TTG - Terkelolanya data posyandu yang terupdate secara berkesinambungan - Meningkatnya mutu pelayanan Posyandu, Posyantek
3.	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya keswadayaan, kemandirian dan kegotongroyongan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan - Meningkatnya kelas Pokma dan Pokmas gakin serta menurunnya jumlah penduduk

4.	Terwujudnya kelembagaan dan manajemen Pemerintahan Desa yang baik	- Meningkatnya peran dan fungsi lembaga masyarakat di Desa/Kelurahan
5.	Terwujudnya pengelolaan kekayaan dan keuangan desa secara transparan dan akuntabel	Meningkatnya jumlah produk hukum untuk Desa/Kelurahan yang diterbitkan selama setahun
6.	Terwujudnya sistem administrasi desa yang modern.	- Meningkatnya tertib pengelolaan keuangan dan aset desa - Terlaksananya pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintah desa berupa LPPD.
7.	Terwujudnya Peningkatan hasil/produksi pangan lokal	Meningkatnya jumlah pengelolaan sistem ketahanan pangan berbasis keluarga
8.	Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan lokal secara dinamis	Meningkatkan pengelolaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

Tabel 2.3
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	SASARAN KEGIATAN	IKU
1	Terwujudnya peningkatan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yang mantap dan mandiri	- Meningkatnya jumlah pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan (LPD, BUMDes, UPK), yang sehat - Meningkatnya administrasi pengelolaan dana bergulir	- Jumlah pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan (LPD, BUMDes, UPK), yang sehat - Jumlah administrasi pengelolaan dana bergulir
2.	Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	- Meningkatnya desiminasi, terapan dan nilai tambah ekonomi produksi terapan TTG - Terkelolanya posyandu secara berkesinambungan	- Jumlah desiminasi, terapan dan nilai tambah ekonomi produksi terapan TTG - Jumlah posyandu yang di kelola secara berkesinambungan
3.	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	- Meningkatnya keswadayaan, kemandirian dan kegotongroyongan	- Jumlah keswadayaan, kemandirian dan kegotongroyongan

		pelaksanaan pembangunan pedesaan - Meningkatnya kelas Pokmas dan Pokmas gakin serta menurunnya jumlah penduduk miskin	pelaksanaan pembangunan pedesaan - Jumlah peningkatan kelas Pokmas dan Pokmas gakin serta jumlah penurunan penduduk miskin
4.	Terwujudnya kelembagaan dan manajemen Pemerintahan Desa yang baik	Meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat dan kualitas lembaga pemerintahan perpustakaan di Desa/Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berperan serta dan berjalannya sistem manajemen pemerintahan di Desa/Kelurahan
5.	Terwujudnya pengelolaan kekayaan dan keuangan desa secara transparan dan akuntabel	Meningkatnya jumlah tertib pengelolaan keuangan dan aset Desa.	Jumlah pengelolaan keuangan dan aset Desa.
6.	Terwujudnya sistem administrasi desa yang modern.	Meningkatnya jumlah Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan tertib pengelolaan administrasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan tertib pengelolaan administrasi
7.	Terwujudnya Peningkatan hasil/produksi pangan lokal	Meningkatnya jumlah pengelolaan sistem ketahanan pangan berbasis keluarga	Jumlah pengelolaan sistem ketahanan pangan berbasis keluarga
8.	Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan lokal secara dinamis	Meningkatkan pengelolaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Pengelolaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

D. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA dan untuk menjabarkan Rencana Kinerja tersebut setiap tahun disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat informasi tentang :

- a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.
- b. Indikator Kinerja sasaran dan target capaiannya
- c. Program dan Kegiatan
- d. Indikator Kinerja Kegiatan dan target capaiannya.

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana selama Tahun 2013 dengan Indikator dan Target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

b. Program dan Kegiatan :

Untuk mencapai sasaran perlu adanya program dan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran yang diinginkan, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan sebagai penjabaran dari program, juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan adalah usuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat diukur lebih akurat dan objektif.

Indikator kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok indikator Input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), Benefit (manfaat) dan impact (dampak). Input adalah semua sumber daya yang diperlukan/digunakan untuk melaksanakan kegiatan, terutama adalah dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu bisa juga berupa SDM, peralatan, metode dan bahan/materi.

Output adalah keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya jumlah kuantitas barang yang dibeli, frekuensi acara/aktifitas yang dilaksanakan dan jumlah orang/lembaga yang telah diberikan pembinaan.

Outcome merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output, misalnya meningkatnya pengetahuan, kesadaran, motivasi dan kualitas perilaku dari pihak yang dibina atau berfungsinya barang yang dibeli. Sedangkan Benefit merupakan manfaat yang diperoleh dari adanya outcome. Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisasi. Indikator kinerja tersebut mesti memenuhi kriteria : spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana selama Tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) seperti sebagai berikut:

3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Tersusunnya APBDesa Sesuai Peraturan Perundang-undangan - Jumlah pemanfaatan DAU Desa - Jumlah Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa - Jumlah buku pedoman Administrasi Desa/Kelurahan - Jumlah Profil Desa/Kelurahan Yang Berkesinambungan - Jumlah Kelian Banjar/Kepala Lingkungan yang dibina 	<ul style="list-style-type: none"> 41 Desa 41 Desa 4 Desa 51 Desa/Kel. 51 Desa/Kel. 252 orang 	<p>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDesa - Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa - Pemilihan Perbekel - Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan - Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan - Terlaksananya pembinaan Pemerintahan desa - Terlaksananya pembinaan LPM 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Kecamatan 41 BPD 51 LPM 	<p>Peningkatan Partisipasi Masy. Dalam Membangun Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlombaan Desa/Kelurahan - Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penerapan TTG oleh masyarakat - Jumlah Pembinaan Kelas Pokmas - Jumlah Kelompok Pamsimas yg dibina - Jml Kelompok Posyantek Percontohan - Jumlah tertib manajemen usaha dan administrasi BUMDes 	<ul style="list-style-type: none"> 7 Kelompok 50 Kelompok 10 kelompok 1 kelompok 41 BUMDes 	<p>Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pendidikan pelatihan teknis dan masyarakat - Penilaian Kelas Pokmas - Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat - Pembinaan Posyantek <p>Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Badan Usaha Milik Desa

<p>Jumlah Monev CBD yang dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pembinaan dan pengembalian dana bergulir - Jumlah Pembinaan Pasar Desa - Terlaksananya Pembinaan Badan Kerja Sama (BKS) LPD 	<p>64 Desa Pakraman</p> <p>253 kelompok</p> <p>10 unit</p> <p>64 LPD</p>	<p>Monitoring, Evaluasi dan pelaporan CBD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengembangan Usaha kelompok masyarakat Dan lembaga ekonomi perdesaan - Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa - Pembinaan Pengelola BKS LPD
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Jumlah Buku KK Miskin di Kabupaten Jembrana yang tersedia - Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana - Jumlah pembinaan Posyandu 	<p>1.580 orang</p> <p>100 buku</p> <p>252 Br/Lingk.</p> <p>5 Kecamatan</p> <p>328 Posyandu</p>	<p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian stimulan pembangunan Desa (PNPM - MP) - Penanggulangan Kemiskinan Terpadu - Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa - PAP - PNPM Integrasi - Pembinaan Posyandu
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan - Jumlah pembinaan desa mandiri pangan - Jumlah pembinaan penganeekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat - Jumlah pembinaan UPGK 	<p>5 Kecamatan</p> <p>5 Kecamatan</p> <p>5 Kecamatan</p> <p>5 Kecamatan</p>	<p>Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan - Pengembangan Desa Mandiri Pangan <p>Diversifikasi Pangan dan Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan penganeekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat - Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi keluarga

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. I Nengah Ledang
Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Jembrana
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Gede Gunadnya, SH., MH
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
Selaku atas nama Bupati Jembrana
Selaku atasan langsung pihak Pertama

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Negara, 30 Januari 2014

**Pihak Kedua
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana**



**Gede Gunadnya, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19561231 198303 1 436**

**Pihak Pertama
Kepala Badan PMPD Jembrana**

**Drs. I Nengah Ledang
Pembina Tk. I
NIP. 19620302 198303 1 025**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Tersusunnya APBDesa Sesuai Peraturan Perundang-undangan - Jumlah pemanfaatan DAU Desa - Jumlah Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa - Jumlah buku pedoman Administrasi Desa/Kelurahan - Jumlah Profil Desa/Kelurahan Yang Berkesinambungan 	<ul style="list-style-type: none"> 41 Desa 41 Desa 4 Desa 51 Desa/Kel. 5 Kecamatan 	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDesa - Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa - Pemilihan Perbekel - Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan - Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> 19.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00
	Mantapnya sistem Pembangunan Partisipatif Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan - Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Kecamatan 5 Kecamatan 	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa <ul style="list-style-type: none"> - Perlombaan Desa/Kelurahan - Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> 120.000.000,00 11.000.000,00

	- Terlaksananya pembinaan LPM	5 Kecamatan	- Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	161.873.500,00
Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha Dan sosial ekonomi masyarakat	- Jumlah penerapan TTG oleh masyarakat	7 Kelompok	- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan masyarakat	20.000.000,00
	- Jumlah Pembinaan Kelas Pokmas	50 Kelompok	- Penilaian Kelas Pokmas	16.760.000,00
	- Jumlah Kelompok Pamsimas yang dibina	10 kelompok	- Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat	26.899.000,00
	- Jumlah Kelompok Posyantek Percontohan	1 kelompok	- Pembinaan Posyantek	5.000.000,00
	- Jumlah tertib manajemen usaha dan administrasi BUMDes	41 BUMDes	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan - Pembinaan Badan Usaha Milik Desa	20.293.000,00
	- Jumlah Monev CBD yang dilaksanakan	64 Desa Pakraman	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan CBD	15.729.900,00
	- Jumlah pembinaan dan pengembalian dana bergulir	253 kelompok	- Pembinaan dan pengembangan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan	12.500.000,00
	- Jumlah Pembinaan Pasar Desa	10 unit	- Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	5.000.000,00
	- Terlaksananya Pembinaan BKS-LPD	64 LPD	- Pembinaan Pengelola BKS LPD	10.000.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1.580 orang	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa - Pemberian stimulan pembangunan Desa (PNPM - MP)

		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana - Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana - Jumlah pembinaan Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Kecamatan 249 Br/Lingk. 5 Kecamatan 328 Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Kemiskinan Terpadu - Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa - PAP - PNPM Integrasi - Pembinaan Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> 97.205.350,00 357.000.050,00 70.000.000,00 66.000.000,00
	Mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan - Jumlah pembinaan desa mandiri pangan - Jlh pembinaan penganeekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat - Jumlah pembinaan UPGK 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 	<p>Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan - Pengembangan Desa Mandiri Pangan <p>Diversifikasi Pangan dan Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan penganeekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat - Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> 25.500.000,00 27.500.000,00 12.000.000,00 380.000.000,00
JUMLAH					1.734.460.800,00

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. I Nengah Ledang

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Jembrana
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Gede Gunadnya, SH., MH

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

Selaku atas nama Bupati Jembrana

Selaku atasan langsung pihak Pertama

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Negara, 8 September 2014

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana



Gede Gunadnya, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19561231 198303 1 436

Pihak Pertama
Kepala Badan PMPD Jembrana

Drs. I Nengah Ledang
Pembina Tk. I
NIP. 19620302 198303 1 025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa	- Jumlah Tersusunnya APBDesa Sesuai Peraturan Perundang-undangan	41 Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDesa	19.000.000,00
		- Jumlah pemanfaatan DAU Desa	41 Desa	- Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa	20.000.000,00
		- Jumlah Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa	4 Desa	- Pemilihan Perbekel	
		- Jumlah buku pedoman Administrasi Desa/Kelurahan	51 Desa/Kel.	- Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	40.000.000,00
		- Jumlah Profil Desa/Kelurahan Yang Berkesinambungan	5 Kecamatan	- Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	30.000.000,00
		- Jumlah aparatur desa yang dibintek	90 orang	- Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Manajemen pemerintahan desa	39.380.000,00
	Mantapnya sistem Pembangunan Partisipatif Masyarakat	- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan	5 Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Perlombaan Desa/Kelurahan	114.000.000,00

		- Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa	5 Kecamatan	- Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa	11.000.000,00
		- Terlaksananya pembinaan LPM	5 Kecamatan	- Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	161.873.500,00
	Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha Dan sosial ekonomi masyarakat			Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	
		- Jumlah penerapan TTG oleh masyarakat	7 Kelompok	- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan masyarakat	18.118.500,00
		- Jumlah Pembinaan Kelas Pokmas	50 Kelompok	- Penilaian Kelas Pokmas	19.666.600,00
		- Jumlah Kelompok Pamsimas yang dibina	10 kelompok	- Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat	26.899.000,00
		- Jumlah Kelompok Posyantek Percontohan	1 kelompok	- Pembinaan Posyantek	5.000.000,00
		- Jumlah tertib manajemen usaha dan administrasi BUMDes	41 BUMDes	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	
		- Jumlah Monev CBD yang dilaksanakan	64 Desa Pakraman	- Pembinaan Badan Usaha Milik Desa	20.086.000,00
		- Jumlah pembinaan dan pengembalian dana bergulir	253 kelompok	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan CBD	16.251.900,00
		- Jumlah Pembinaan Pasar Desa	10 unit	- Pembinaan dan pengembangan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan	8.885.000,00
		- Terlaksananya Pembinaan BKS-LPD	64 LPD	- Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	5.000.000,00
				- Pembinaan Pengelola BKS LPD	10.000.000,00

<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana - Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana - Jumlah pembinaan Posyandu 	<p>1.580 orang</p> <p>5 Kecamatan</p> <p>249 Br/Lingk.</p> <p>5 Kecamatan</p> <p>328 Posyandu</p>	<p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian stimulan pembangunan Desa (PNPM - MP) - Penanggulangan Kemiskinan Terpadu - Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa - PAP - PNPM Integrasi - Pembinaan Posyandu 	<p>170.200.000,00</p> <p>96.391.350,00</p> <p>347.974.950,00</p> <p>74.114.000,00</p> <p>86.000.000,00</p>
<p>Mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan - Jumlah pembinaan desa mandiri pangan - Jlh pembinaan panganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat - Jumlah pembinaan UPGK 	<p>5 Kecamatan</p> <p>5 Kecamatan</p> <p>5 Kecamatan</p> <p>5 Kecamatan</p>	<p>Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan - Pengembangan Desa Mandiri Pangan <p>Diversifikasi Pangan dan Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan panganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat - Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga 	<p>22.500.000,00</p> <p>27.500.000,00</p> <p>12.000.000,00</p> <p>458.720.000,00</p>
JUMLAH				1.863.560.800,00

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pencapaian Kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu

Kegiatan Posyandu di Kabupaten Jember didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 99,99% atau sebesar Rp. 85.997.283,- (Delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dengan sasaran utama yaitu Terkelolanya posyandu secara berkesinambungan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pembinaan posyandu aktif dengan target 328 posyandu dan terealisasi 328 posyandu (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% serta dengan jumlah tenaga yang digunakan sebanyak 9 orang.

Faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini yaitu adanya kerja sama Tim yang Solid baik di Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta adanya koordinasi lintas sektoral. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Sistem perencanaan materi, pelaksanaan dan evaluasi layanan belum sepenuhnya dilakukan secara partisipatif. Adapun pemecahannya adalah dilakukannya Bintek dan monev sistem kerja layanan Posyandu kepada Tim Pelaksana di lapangan dan koordinasi lintas sektoral dan lintas pelaku dalam upaya pemantapan sistem layanan Posyandu, baik ditingkat banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun perkembangan posyandu berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

1	Posyandu Pratama	5	5	5	5	7
2	Posyanadu Madya	91	91	91	91	91
3	Posyandu Purnama	201	201	201	201	201
4	Posyandu Mandiri	31	31	31	31	31
Jumlah		328	328	328	328	330

2. Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Sesuai Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 347.974.950,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 99,98% atau sebesar Rp. 347.968.880,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keswadayaan, kemandirian dan kegotongroyongan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah keswadayaan, kemandirian dan kegotongroyongan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan dengan target 253 banjar/lingkungan dan terealisasi (100%). Alat yang digunakan kendaraan roda 4 dan 2 dengan realisasi 100%, serta melibatkan 54 orang tim penilai dan 5 orang tim pemantau kegiatan dengan realisasi 100%. Hasil kegiatan ini :

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Bendera Putih	43	42	41	47
2	Bendera Merah	8	9	10	4
3	Bendera Hitam	0	0	0	0
Jumlah Desa/Kel.		51	51	51	51

Keterangan :

- *bendera putih : desa/kelurahan gotong royong*
- *bendera merah : desa/kelurahan harapan*
- *bendera hitam : desa/kelurahan binaan*

Faktor penghambat :

- Tingkat kesadaran masyarakat untuk bergotong royong Belum maksimal baik dari hasil kegiatan maupun kehadiran di lokasi kegiatan.
- Secara fisik gotong royong sebagian besar masih terbatas pada pembersihan jalan dan Belum menyentuh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

- Melakukan monitoring pelaksanaan gotong royong dengan membentuk Tim Pemantauan, Evaluasi Gotong Royong Tingkat Kabupaten secara berkala setiap bulan.
- Melakukan pembinaan ke Desa/Kelurahan untuk memantapkan pelaksanaan gotong royong

3. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2014 sebesar Rp. 170.200.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 100 % atau sebesar Rp. 170.200.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah kader yang terfasilitasi target 153 orang dari tenaga KPMD dan 5 orang Pendamping Lokal dengan realisasi 100%. Jumlah tenaga yang dilibatkan yaitu sebanyak 10 orang Tim Satker/Pembina. Adapun perkembangan/pencapaian pembangunan yang telah dilakukan melalui Kegiatan PPK (PNPM-MP) sebagai wahana pembelajaran pembangunan partisipatif dengan menerapkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM) mulai dari penggalian gagasan, perencanaan, melaksanakan/merealisasikan sampai dengan pelestariannya telah menunjukkan kemajuan signifikan yang dapat diukur dari tingkat partisipasi, kemampuan dan memandirikan masyarakat dalam melaksanakan program sebagai berikut :

No.	Tahun	Musdes (Kali)	Musy. Antar Desa (Kali)	Pelaku (Orang)	Masyarakat Yg Terlibat (Orang)
1	2010	204	45	165	25.671
2	2011	204	45	165	26.023
3	2012	204	45	165	26.023
4	2013	204	45	165	26.023
5	2014	204	45	165	26.023

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi angka kemiskinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat serta banyaknya program – program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang diluncurkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan faktor penghambatnya yaitu :

di tingkat Desa/Kelurahan dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan Desa.

- Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi swadaya dalam membangun desa masih relatif rendah

Dan upaya pemecahannya antara lain :

- Melakukan Pemantauan/Monitoring kegiatan oleh tim koordinasi kabupaten secara berkala untuk memberikan solusi dan arahan teknis sesuai dengan masalah dan kendala yang dihadapi di lapangan.
- Memantapkan komitmen bahwa keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan menyentuh langsung kepada KK Miskin.

4. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2014 sebesar Rp. 96.391.350,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 99,99% atau sebesar Rp. 96.385.450,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100%. Jumlah pesonil yang dilibatkan yaitu tim pencocokan, evaluasi dan verifikasi KK Miskin Kabupaten sebanyak 306 orang dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Tersedianya buku KK Miskin di Kabupaten Jembrana. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah ketersediaan buku KK Miskin di Kabupaten Jembrana

Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana terus dapat diturunkan:

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Prosentase	
		KK	Orang	KK	Orang	KK	Orang
1	2013	89.159	321.008	4.683	14.872	5,30	4,60
2	2012	86.685	317.117	5.284	16.806	6,00	5,00
3	2011	85.025	311.573	5.935	18.872	6,98	6,05
4	2010	84.663	307.578	5.597	17.623	6.61	5,65

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi angka kemiskinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat serta banyaknya program – program yang bertujuan

Kabupaten/Kota, sedangkan faktor penghambatnya yaitu :

- Kecilnya sumber pendanaan yang ada untuk alokasi penanggulangan kemiskinan.
- Rendahnya komitmen masyarakat dalam membantu rumah tangga miskin terbukti masih adanya kecemburuan social terhadap pelaksanaan program yang memihak Rumah Tangga Miskin
- Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan jira kewirausahaan di kalangan KK Miskin

Dan upaya pemecahannya antara lain :

- Pemantapan Inklusi sosial kepada semua pihak terutama terhadap tokoh – tokoh masyarakat untuk meminimalisir adanya kecemburuan sosial terhadap program penanggulangan kemiskinan.
- Perlu adanya keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang di implementasikan kedalam dana cost sharring baik ditingkat pusat, provinsi maupun ditingkat Kabupaten.

5. Kegiatan PAP PNPM - Integrasi

Kegiatan PAP-PNPM Integrasi (Monev dan Pelaporan) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2014 sebesar Rp. 74.114.000,- (Tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 99,54 % atau sebesar Rp. 73.770.344,- (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah). Jumlah pesonil yang dilibatkan sebanyak 9 orang dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan PNPM. Bentuk dan hasil kegiatan PAP-PNPM Integrasi tahun 2014 yaitu pembinaan dan monitoring pelaksanaan PNPM dengan harapan memberikan pemahaman kepada pelaku PNPM dan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip – prinsip dasar pelaksanaan PNPM secara nyata. Sasaran kegiatan adalah sistem administrasi dan penyaluran dana di tingkat unit pengelola kegiatan (UPK) di masing – masing kecamatan, pengelolaan dan pemanfaatan dana BLM di masing – masing tim pengelola kegiatan (TPK) desa/kelurahan serta tingkat kemajuan kegiatan fisik dan partisipasi masyarakat di lapangan.

Kabupaten Jembrana setiap tahunnya selalu mengadakan Perlombaan Desa/Kelurahan, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga untuk meningkatkan kinerja Desa/Kelurahan. Untuk Tahun 2014 Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2014 sebesar Rp. 114.000.000,- (Seratus empat belas juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 98,24% atau sebesar 111.995.930,- (Seratus sebelas juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan merupakan bagian dari program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan target Desa/Kelurahan di 5 Kecamatan dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 15 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan selain diadakan ditingkat Kabupaten juga dilaksanakan ditingkat provinsi.dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	JENIS PERLOMBAAN			
	Lomba Desa	Prestasi	Lomba Kelurahan	Prestasi
2011	Yeh Sumbul	II	Pendem	VII
2012	Dlod Berawah	V	Dauh Waru	V
2013	Banyubiru	IV	Gilimanuk	II
2014	Ekasari	I	Lelateng	VI

Untuk Tahun 2014 Desa Ekasari mewakili provinsi Bali dalam lomba desa tingkat Nasional dan berhasil masuk dalam peringkat 10 Besar Nasional

Faktor penunjang keberhasilan kegiatan dimaksud adalah adanya komitmen pimpinan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait. Faktor – faktor penghambat kegiatan ini adalah pengisian profil desa/kelurahan yang merefleksikan potensi dan perkembangan pembangunan belum dilaksanakan secara akurat, tertib dan berkesinambungan, disamping masalah dana yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengumpulan data. Dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut diatas perlu diambil langkah – langkah dini untuk mengantisipasi data yang akurat di Desa/Kelurahan dengan cara melaksanakan pembinaan yang lebih intensif dan fokus terhadap pengisian buku – buku administrasi Desa/Kelurahan dan profil Desa/Kelurahan disamping peningkatan anggaran untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan

7. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM)

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2014 sebesar Rp. 161.873.500,- (Seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 99,87 %

ribu lima ratus ribu rupiah).

Jumlah pesonil yang dilibatkan yaitu sebanyak 6 orang dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah LPM yang terbina sebanyak 51 LPM, dengan realisasi 100%

Faktor – faktor penghambat kegiatan ini yaitu belum maksimalnya fungsi dan peran LPM dalam mengawal proses pembangunan di masing – masing desa/kelurahan. solusi pemecahan masalah tersebut antara lain dilakukan bimtek kepada pengurus LPM se Kabupaten Jembrana. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah pengurus LPM (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) se Kabupaten Jembrana lebih memahami peran dan fungsinya di Desa/Kelurahan, sehingga ikut berperan aktif di dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil – hasil pembangunan di Desa/Kelurahan masing – masing, perkembangan LPM di Kabupaten Jembrana seperti pada tabel berikut :

NO	TAHUN	JML DESA/KELURAHAN	JML LPM	KETERANGAN
1	TAHUN 2014	51	51	
2	TAHUN 2013	51	51	
3	TAHUN 2012	51	51	
4	TAHUN 2011	51	51	

8. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2014 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 95,25% atau sebesar Rp. 10.478.000,- (Sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Jumlah pesonil yang dilibatkan yaitu sebanyak 6 orang dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah BPD yang terbina sebanyak 41 BPD, dengan realisasi 100%

Faktor – faktor penghambat kegiatan ini yaitu belum maksimalnya fungsi dan peran BPD dalam mengawal proses pembangunan di masing – masing desa, solusi pemecahan masalah tersebut antara lain dilakukan pembinaan pengurus BPD se Kabupaten Jembrana Adapun hasil dari kegiatan ini adalah 1). BPD tertib administrasi dengan pengisian buku – buku administrasi Desa/Kelurahan, 2). Meningkatkan peran BPD melalui pemahaman

Kabupaten Jembrana seperti pada tabel berikut :

NO	TAHUN	JML DESA	JML BPD	KETERANGAN
1	TAHUN 2014	41	41	
2	TAHUN 2013	41	41	
3	TAHUN 2012	41	41	
4	TAHUN 2011	41	41	

9. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 18.118.500,- (Delapan belas juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2014 sebesar 98,95 % atau sebesar Rp. 17.927.500,- (Tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Tenaga yang ditugaskan sebanyak 4 orang dengan raelisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah Desiminasi terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan target 5 kelompok dan terealisasi 5 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal, TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (relatif meniru dan dan merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal. Cara pemecahannya yaitu Rekayasa sosial dan perancangan bangunan teknologi melalui lomba Pokmas pelaksana TTG, Desiminasi TTG lewat Jinet, Pembinaan– pembinaan oleh Tim.

Pemerintah Kabupaten Jembrana selalu mengadakan perlombaan kelompok pelaksana TTG baik ditingkat Kabupaten maupun provinsi serta mengikuti gelar TTG Nasional dengan hasil sebagai berikut:

NO.	TAHUN	NAMA KELOMPOK	PRESTASI
1	2011	Klp Agus Handycraft, Desa Pohsanten	Juara II tingkat provinsi
2	2012	Klp Galang Kangin, Desa Ekasari	Juara II tingkat provinsi

4	2014	Klp Segar Lestari, Banjar Ambyarsari, Desa Blimbingsari	Juara I tingkat kabupaten
---	------	---	---------------------------

10. Kegiatan Penilaian Kelas Pokmas

Kegiatan Kelas Pokmas di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 19.666.600,- (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2014 sebesar 99,99 % atau sebesar Rp. 19.666.000,- (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan realisasi fisik 100%. Tenaga yang ditugaskan sebanyak 10 orang dengan raelisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah Jumlah Pokmas yang dievaluasi dengan target 1500 kelompok dan terealisasi 1500 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengetahuan dan keterampilan kelompok masyarakat belum optimal. Cara pemecahannya dilakukan pembinaan dan pengukuhan kelas Pokmas oleh Tim Pembina/penilai Kabupaten. Hasil dari kegiatan ini untuk meningkatkan klasifikasi kelas Pokmas, adapun perkembangan klasifikasi kelas Pokmas sebagai berikut :

TAHUN	KLASIFIKASI KELAS POKMAS				JUMLAH
	PEMULA	LANJUT	MADYA	UTAMA	
2011	513	461	252	38	1264
2013	562	594	273	32	1461
2014	405	583	265	49	1302

11. Kegiatan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat

Kegiatan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 26.899.000,- (Dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2014 sebesar 91,45 % atau sebesar Rp. 24.599.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Tenaga yang ditugaskan sebanyak 4 orang dengan raelisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Indikator Kinerja

kelompok dan terealisasi 10 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Hasil dari kegiatan ini untuk meningkatkan manajemen pengelolaan kelompok Pamsimas

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengetahuan dan keterampilan kelompok pengelolaan air minum berbasis masyarakat yang belum optimal. Cara pemecahannya dilakukan pembinaan/bimbingan teknis oleh Tim Pembina/penilai Kabupaten. Hasil dari kegiatan ini untuk meningkatnya pengelolaan kelompok Pamsimas.

12. Kegiatan Pos Pelayanan Teknologi

Kegiatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2014 sebesar 99,90% atau sebesar Rp. 4.995.000,- (Empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 4 orang dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah kelompok Pamsimas yang di bintek dengan target 1 kelompok dan terealisasi 1 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Hasil dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengelolaan kelompok Posyantek

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengetahuan dan keterampilan kelompok posyantek belum optimal. Cara pemecahannya dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten. Hasil dari kegiatan ini untuk meningkatnya pengelolaan kelompok Posyantek.

13. Kegiatan Pembentukan Percontohan BUMDes

Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) didukung dengan APBD II Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 20.086.000,- (Dua puluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 99,78 % atau sebesar Rp. 20.041.000,- (Dua puluh juta empat puluh satu ribu rupiah), dengan realisasi fisik 100%

Tenaga yang ditugaskan sebanyak 9 orang dengan realisasi 100%, Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi

usaha BUMDes dengan target 40 BUMDes dan telah terealisasi 40 BUMDes (100%) dengan tenaga sebanyak 9 orang. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%

Faktor penghambatnya yaitu Pengetahuan dan keterampilan pengelolaan BUMDes masih terbatas, BUMDes yang telah terbentuk sebagian besar masih memiliki modal kerja yang terbatas dan kegiatan usaha berupa simpan pinjam. Adapun pemecahannya adalah dilakukannya:

- Memberikan fasilitasi berupa rekomendasi untuk mendapatkan permodalan dari pihak perbankan maupun sumber – sumber permodalan lainnya yang tidak memberatkan,
- Sesuai amanat Pasal 23 Perda Nomor 21 Tahun 2001, modal BUMDes diupayakan dari penyertaan Desa dari kekayaan yang dipisahkan, berupa penyertaan modal dari ADD, menggiatkan tabungan masyarakat, pinjaman, kerjasama bagi hasil dengan pihak lain.
- Melakukan bintek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan manajemen, administrasi dan usaha secara berkala serta berkesinambungan dengan tingkat perkembangan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Desa	Jumlah BUMDES	%
1	2010	41	39	95,2 %
2	2011	41	39	95,2%
3	2012	41	39	95,2%
4	2013	41	39	95,2%
5	2014	41	40	97,5%

14. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan didukung dengan APBD II Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 8.885.000,- (Delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 98,00 % atau sebesar Rp. 8.734.310,- (Delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100%

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% dengan tenaga sebanyak 9 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pembinaan terhadap kelompok masyarakat penerima dana bergulir sehingga berkurangnya tunggakan Pokmas Dalir

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan didukung dengan APBD II Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 16.251.900,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 99,85 % atau sebesar Rp. 16.227.450,- (Enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% dengan tenaga sebanyak 9 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya pemahaman terhadap lembaga pengelola CBD yang saat ini cenderung diartikan salah serta pembuatan buku hasil monitoring yang telah disebarakan kepada masing – masing Desa Pakraman

16. Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa didukung dengan APBD II Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 100,00 % atau Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Tenaga yang ditugaskan sebanyak 9 orang dengan realisasi 100%, Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pasar desa yang dibina dengan target 10 unit pasar desa dan terealisasi 10 unit pasar (100%) dengan tenaga sebanyak 9 orang. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%

Faktor penghambatnya yaitu pengetahuan dan keterampilan pengelolaan pasar desa masih terbatas, sedangkan pemecahannya adalah dilakukannya melakukan bintek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan manajemen, administrasi dan usaha secara berkesinambungan.

17. Fasilitasi Badan Kerjasama LPD (BKS-LPD)

Kegiatan Fasilitasi Badan Kerjasama LPD (BKS – LPD) didukung dengan APBD II Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 100,00 % atau sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Tenaga yang ditugaskan sebanyak 9 orang dengan realisasi 100%, Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi

LPD dengan target 1 paket dan telah terealisasi 1 paket (100%) dengan tenaga sebanyak 9 orang. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Hasil kegiatan ini meningkatnya manajemen pengelolaan BKS-LPD.

18. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2014 sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 99,75% atau sebesar Rp. 18.952.500,- (Delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya untuk mengetahui jumlah pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang taat asas efektif dan efisien dengan target 41 Desa dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 15 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%.

Faktor – faktor penghambat kegiatan ini yaitu penyusunan APBDes Belum dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Rendahnya kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun APBDes, sedangkan solusi pemecahan masalah tersebut antara lain dilakukan pembinaan penyusunan APBDes sebanyak 3 kali. mulai tahun 2007 setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa dilakukan fasilitasi dan monitoring secara intensif kepada seluruh desa di Kabupaten Jembrana sehingga seluruh desa di Kabupaten Jembrana sampai tahun 2013 telah menyusun APBdesa yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan seperti tersebut diatas dan telah mampu menyerap partisipasi dan aspirasi masyarakat desa secara menyeluruh didalam pembangunan desa.

19. Kegiatan Pemilihan Perbekel

Kegiatan Pemilihan Perbekel di Kabupaten Jembrana untuk tahun 2014 sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri maka pemilihan Perbekel dan kelihan dinas/kepala lingkungan ditiadakan dikarenakan adanya pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan ditunda sampai dengan tahun 2015

Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 99,99 % atau sebesar Rp. 39.999.500,-(Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100%

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan tertib pengelolaan administrasi dengan realisasi 51 Desa/Kelurahan dengan realisasi (100%), SDM yang digunakan yaitu sebanyak 15 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Faktor penghambat kegiatan ini adalah administrasi desa belum tertib dan laporan administrasi desa setiap bulan tidak tepat waktu, sedangkan cara pemecahannya yaitu dilakukan Monitoring dan Pembinaan pengisian administrasi desa secara berkala, Memberikan bantuan buku – buku administrasi Desa dan Membuatkan sistem laboran IT bagi seluruh perangkat Desa. Perkembangan jumlah Desa/Kelurahan yang sudah tertib administrasi Desa/Kelurahan seperti pada tabel berikut :

No.	Tahun	Tertib Administrasi			Jumlah
		Belum Lengkap	Tahap Melengkapi	Lengkap	
1	2009	3	11	37	51
2	2010	0	0	51	51
3	2011	0	0	51	51
4	2012	0	0	51	51
5	2013	0	0	51	51
6	2014	0	0	51	51

21. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2014 sebesar Rp. 39.380.000,- (Tiga puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 90,66% atau sebesar Rp. 35.702.200,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus dua ribu dua ratus rupiah). Hasil dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan manajemen pemerintahan desa

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya jumlah aparatur desa yang dibintek dengan target 90 orang dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu

sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%.

22. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 95,82% atau sebesar Rp. 19.165.975,- (Sembilan belas juta seratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100% Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya untuk mengetahui jumlah pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang taat asas efektif dan efisien dengan target 41 Desa dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 15 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%.

Faktor – faktor penghambat keberhasilan kegiatan ini adalah masih desa yang melaksanakan kegiatan tidak mengacu kepada APBDes, Volume kegiatan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Solusi pemecahan masalah tersebut antara lain melakukan Monitoring dan Pembinaan langsung kelapangan terhadap pemanfaatan/kegiatan yang dibiayai DAU Desa serta dilakukan pembinaan pemanfaatan DAU Desa Kepada perangkat Desa, BPD dan LPM sebanyak 2 kali dalam setahun.

No.	Tahun	ADD	Hasil Bagi Pajak
1	2010	6,830,000,000	494,638,750
2	2011	3.974.507.853	5.039.983.791
3	2012	8.700.000.000	7.888.318.627
4	2013	8.847.000.000	8.528.288.039
5	2014	8.847.000.000	5.675.636.600

23. Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 99,65% atau sebesar Rp. 29.897.000,- (Dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100%

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya untuk mengetahui jumlah desa yang mempunyai profil desa/kelurahan dengan target 51 Desa/kelurahan dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 6 orang dan

Adapun hasil kegiatan ini yaitu tersusunnya profil Desa/Kelurahan tahun 2014 di masing – masing Desa/Kelurahan.

24. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2014 sebesar 99,48% atau sebesar Rp. 25.365.766,- (Dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pembinaan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan target 5 Kecamatan, dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%.

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum mantapnya koordinasi antara pelaku ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif .

Bentuk kegiatan ini dengan melaksanakan lomba Adikarya Pangan Nusantara tingkat kecamatan, yang merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kompetensi kelompok masyarakat/kelompok tani dalam menggiatkan usaha pengolahan hasil pertanian dengan memanfaatkan sumber pangan lokal sebagai bahan pangan keluarga. Adapun hasil kejuaraan Lomba Adikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

NO.	TAHUN	NAMA KELOMPOK	PRESTASI
1	2012	Kelompok Wanita Tani Mekar sari Br. Merta Sari Kelurahan Loloan Timur, Kec.Jembrana.	Juara III Tingkat Provinsi dan mengikuti Hari Pangan Nasional di Palangkaraya.
2	2013	Kelompok Miftahul Ulum, Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana	Juara III Tingkat Provinsi Bali dan mengikuti Hari Pangan Nasional Provinsi Bali di Kabupaten Badung.
3	2014	KWT Boga Asri, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Jembrana	

25. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

26.750.000,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan target 5 Kecamatan, dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%.

- b. Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rumah tangga dapat mengoptimalkan pekarangannya sebagai sumber pangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah serta budidaya ternak dan ikan demi menunjang ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, protein dan lemak untuk keluarga. Adapun kelompok penerima bantuan dari kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan adalah :
1. Kelompok Usaha Manuk Utami, Banjar Pasar, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan.
 2. Kelompok Pangan Lestari, Banjar Tegak Gede, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo.
 3. Kelompok Sari Nadi, Lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana.
 4. Kelompok Amanah, Lingkungan Pertukangan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara.
 5. Kelompok Sari Merta, Banjar Ketiman Kaja, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya.

26. Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga

Kegiatan Kegiatan Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 458.720.000,- (Empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 adalah 99,96% atau sebesar Rp. 458.546.000,- (Empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) Bentuk kegiatan ini yaitu dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di masing – masing Posyandu (328 posyandu) se Kabupaten Jembrana sebanyak 12 paket selama 12 bulan, adapun paket PMT yang diberikan terdiri dari Kacang hijau, gula pasir dan susu. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan UPGK dan pemberian makanan tambahan dengan hasil kegiatan meningkatnya kualitas gizi keluarga

Tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diversifikasi Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan

keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu Kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan kosong belum optimal. Solusi yang dilakukan adalah dilaksanakannya penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif. Perkembangan Gizi Balita di Posyandu seperti Tabel berikut:

No	Tahun	Hasil Kegiatan					
		S	D	N	BGM	N/D(%)	BGM/D(%)
1	2010	18.133	12.152	7.936	187	65,31	1,54
2	2011	18.582	12.605	8.362	180	66,37	1,43
3	2012	18.741	13.138	8.669	163	65,98	1,24
4	2013	18.891	15.236	10.277	126	67,45	0,83
5	2014	18.854	15.834	11.869	101	85,32	0,64

Keterangan :

- S : Jlh semua balita yang ada diwilayah Posyandu
D : Jlh balita yang datang dan ditimbang di Posyandu
N : Jlh balita yang naik berat badannya dari penimbangan bulan sebelumnya
BGM : Balita yang berat badannya dibawah garis merah
N/D : Jlh balita yang naik berat badannya dari penimbangan bulan sebelumnya
Dibagi jlh balita yang datang dan ditimbang di posyandu
BGM/B : Jlh balita yang berat badannya di bawah garis merah dibagi jlh balita yang datang dan ditimbang di posyandu

27. Kegiatan Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

Kegiatan Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 adalah 100% atau sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), dengan realisasi fisik 100 %. Bentuk kegiatan ini adalah melakukan pembinaan, sosialisasi dan promosi kepada masyarakat melalui pembuatan Billboard. Dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan. Tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diversifikasi Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pembinaan Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat dengan target 5 kecamatan dan terealisasi 5 kecamatan (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Faktor – faktor

dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam asupan makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana tahun 2014, didukung dengan dana sejumlah Rp 5.373.177.200,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp 2.717.598.400,00 sedangkan Alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.655.578.800,00. Dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 2.572.751.089,00 (95 %), silpa belanja tak langsung sebesar Rp. 144.847.311,00 (5%) sedangkan untuk realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.617.958.220,00 (98,6%). dengan silpa belanja langsung sebesar Rp. 37.620.309,00 (1,4%). Adapun rincian penggunaan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi belanja tak langsung Badan PMPD
Kabupaten Jembrana Tahun 2014

1. Belanja tak langsung

No	Uraian	Pagu Dana	Realisasi	%
1	Gaji Pokok PNS	1.420.225.500,00	1.358.181.800,00	95,6
2	Tunjangan Keluarga	162.202.800,00	144.875.814,00	89,3
3	Tunjangan Jabatan	172.885.000,00	170.885.000,00	98,8
4	Tunjangan Fungsional	0	0	0
5	Tunjangan Fungsional Umum	41.640.700,00	37.990.000,00	91,2
6	Tunjangan Beras	91.255.300,00	78.480.000,00	86,0
7	Tunjangan PPh	50.545.000,00	36.106.023,00	71,4
8	Pembulatan Gaji	28.000,00	26.300,00	93,9
9	Iuran Asuransi Kesehatan	43.949.100,00	41.521.192,00	94,5
10	Tambahan Penghasilan Beban Kerja	577.080.000,00	451.560.000,00	78,2
11	Uang Lauk Pauk	166.320.000,00	95.985.000,00	57,7
12	Tambahan penghasilan untuk bendahara	1.680.000,00	1.680.000,00	100
13	Tambahan penghasilan bendahara pembantu	1.200.000,00	1.200.000,00	100
14	Tunjangan PPTK	6.000.000,00	6.000.000,00	100
15	Tunjangan Pengurus Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	100
16	Tunjangan pejabat pengadaan	3.000.000,00	3.000.000,00	100
17	Tunjangan PPK	2.400.000,00	2.400.000,00	100
	TOTAL	2.742.811.400,00	2.572.751.089,00	95

2. Belanja langsung

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Fisik (%)	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian	Ket. (Silpa)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	78	3.000.000,-	2.330.000,-	78	670.000,-
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	97	112.382.600,-	109.028.720,-	97	3.353.880,-
3.	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100	5.000.000,-	5.000.000,-	100	-
4.	Kegiatan Penyediaan ATK	100	42.777.200,-	42.693.500,-	100	83.700,-
5.	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	93	60.075.700,-	56.002.650,-	93	4.073.050,-
6.	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	96	15.000.000,-	14.360.000,-	96	640.000,-
7.	Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	217.002.400,-	216.328.932,-	99	673.468,-
8.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100	260.000.000,-	245.045.000,-	94	14.955.000-
9.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu	100	14.000.000,-	13.300.000,-	95	700.000,-
10.	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	98	22.780.100,-	22.395.100,-	98	385.000,-
11.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis masyarakat	99	18.118.500,-	17.927.500,-	99	191.000,-
12.	Penilaian Kelas Pokmas	100	19.666.600,-	19.666.000,-	100	600,-
13.	Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat	91	26.899.000,-	24.599.000,-	91	2.300.000,-
14.	Pos Pelayanan Teknologi	100	5.000.000,-	4.995.000,-	100	5.000,-
15.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100	16.251.900,-	16.227.450,-	100	24.450,-
16.	Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	100	5.000.000,-	5.000.000,-	100	,-
17.	Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	100	20.086.000,-	20.041.000,-	100	45.000,-
18.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan	98	8.885.000,-	8.734.310,-	98	150.690,-
19.	Fasilitasi Badan Kerjasama LPD (BKS –	100	10.000.000,-	10.000.000,-	100	,-

20.	Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa	100	347.974.950,-	347.968.800,-	100	6.070,-
21.	Pemberian stimulan pembangunan desa	100	170.200.000,-	170.200.000,-	100	-
22.	PAP – PNPB Integrasi (Monev dan Pelaporan)	99	74.114.000,-	73.730.344,-	99	383.656,-
23.	Penanggulangan kemiskinan terpadu	100	96.391.350,-	96.387.540,-	100	3.810,-
24.	Kegiatan Perlombaan desa/kelurahan	100	114.000.000,-	111.995.930,-	98	2.004.0700,-
25.	Posyandu	100	86.000.000,-	86.000.000,-	100	,-
26.	Fasilitasi TMMD	100	40.000.000,-	39.423.640,-	98,6	576.360,-
27.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM)	100	161.873.500,-	161.673.500,-	100	200.000,-
28.	Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa (BPD)	95	11.000.000,-	10.478.000,-	95	522.000,-
29.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	100	39.380.000,-	35.702.200,-	91	3.677.800,-
30.	Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APB Desa	100	19.000.000,-	18.952.500,-	100	47.500,-
31.	Kegiatan pembinaan administrasi desa/kelurahan	100	40.000.000,-	39.999.500,-	100	500,-
33.	Kegiatan Pembinaan dan evaluasi penggunaan DAU Desa	100	20.000.000,-	19.165.975,-	96	834.025,-
34.	Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	100	30.000.000,-	29.897.000,-	100	103.000,-
35.	Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga	100	458.720.000,-	458.546.000,-	100	174.000,-
36.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	100	27.500.000,-	26.750.000,-	97	750.000,-
37.	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	100	25.500.000,-	25.365.766,-	99	134.234,-
38.	Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	100	12.000.000,-	12.000.000,-	100	,-
	JUMLAH	98,6	2.655.578.800,-	2.617.958.220,-	98,6	37.620.580,-

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2014. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

LAKIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan gambaran Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2014 serta sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2014.

Dengan tersusunnya LAKIP ini, dapat digunakan sebagai penjabaran dalam pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

Negara, 18 Pebruari 2015

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana,

Drs. I Nengah Ledang
Pembina Tk. I
NIP. 19620302 198303 1 025